
Analisis Akuntabilitas dan Efektivitas Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada UPTD Puskesmas Tinongko Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa akuntabilitas dan efektivitas anggaran bantuan operasional kesehatan (BOK) pada UPTD Puskesmas Tinongko kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, mengingat wilayah kerja dari puskesmas tersebut sangatlah jauh dari pusat kota dengan jangkauan kepulauan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran bantuan ini selalu diperbarui setiap tahun sesuai dengan keperluan dari puskesmas, efektivitas dari bantuan ini bisa terserap semuanya ini terbukti dengan terpakainya anggaran yang ada. Proses penggunaan anggaran berjalan dengan baik sesuai dengan pos masing-masing anggaran, walaupun terkadang ada kendala yang di dapati seperti penyaluran ke daerah pulau yang memakan waktu lama, juga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas Tinongko ini.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Efektivitas,

Abstract

This study aims to determine the accountability and effectiveness of the Health Operational Assistance (BOK) budget at the Tinongko Health Center UPTD, Wori sub-district, North Minahasa Regency, considering that the working area of the health center is very far from the city center with archipelago reach. The results of the study indicate that the aid budget is always updated every year according to the needs of the puskesmas, the effectiveness of this assistance can be absorbed, all of this is proven by the use of the existing budget. The process of using the budget goes well in accordance with each budget post, although sometimes there are obstacles that are found such as distribution to island areas which takes a long time, also not all communities are covered in the activities carried out by the Tinongko Health Center.

Keywords: Accountability, Effectiveness,

PENDAHULUAN

Kesehatan ialah salah satu faktor penting dalam keberlangsungan sumber daya manusia serta menjadi pendukung dalam pembangunan ekonomi. Sehingga pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai hal yang perlu dipercepat. Kualitas pelayanan publik juga menjadi salah satu hal yang penting seiring dengan berkembangnya kesadaran bahwa masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang baik sehingga tercipta nilai kepuasan pelayanan yang baik. Dalam ilmu Akuntansi, Akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban. Dimana, suatu organisasi disebut akuntabel jika mampu menjelaskan keadaan atau kondisi yang dialami termasuk pengambilan keputusan dari berbagai aktivitas yang

dilakukan. Sejalan dengan *National Summit* pada tahun 2009, pemerintah memberikan perhatian lebih pada perluasan jaminan kesehatan, penekanan pada upaya *promotif-preventif*, dan penanggulangan penyakit dan percepatan dengan tujuan pencapaian MDG's Kemenkes (2010). *Millenium Development Goals* (MDGs) atau tujuan pembangunan Milenium pada tahun 2015 adalah mewujudkan kesejahteraan penduduk, tujuan bersama dalam MDGs tersebut terdiri dari 8 tujuan yang meliputi :

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan.
- 2) Mencapai pendidikan dasar untuk semua.
- 3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
- 4) Menurunkan angka kematian anak.
- 5) Meningkatkan kesehatan ibu.
- 6) Memerangi penyebaran HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya.
- 7) Kelestarian lingkungan hidup.
- 8) Membangun kemitraan global dalam pembangunan.

8 tujuan MDG's diatas 5 diantaranya terkait dgn bidang kesehatan yaitu no 1,4,5,6 dan 7. Tahun 2010 pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Kesehatan mengeluarkan program yang dinamakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dimana bantuan ini merupakan salah satu program dari Kementerian Kesehatan. Dana Bantuan Operasional Kesehatan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan yang disalurkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota melalui mekanisme tugas pembantuan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 494/Menkes/SK/IV/2010 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan bagi puskesmas dalam melakukan berbagai upaya kesehatan yang bersifat *promotif* dan *prefentif*, merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah

dalam upaya kesehatan. Puskesmas yang memegang peranan sebagai Unit Pelaksana Kesehatan Teknik (UPT) berfungsi untuk pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya secara *proaktif* dan *responsive*.

Dana bantuan ini diharapkan mampu memenuhi sebagian besar harapan masyarakat di beberapa daerah, namun seiring berjalannya bantuan ini terdapat beberapa kendala, adapun kendalanya antara lain jauhnya jarak antara puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten dan kota, terlebih untuk daerah Indonesia timur dan tengah yang mengakibatkan terhambatnya pelaporan dan atau penarikan dana serta penyerahan Plan Of Action (POA) yang merupakan syarat utama untuk bantuan operasional kesehatan, keterlambatan pencairan anggaran bantuan yang mengakibatkan pencapaian pelaksanaan program bantuan menjadi tidak maksimal. Segi akuntabilitas juga mempunyai kendala berupa kualitas POA yang belum sesuai petunjuk teknis penggunaan dana alokasi BOK. Penelitian dalam bidang ini pernah juga ada yang meneliti antara lain Mulya (2014) “ pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for money* pada instansi pemerintah di Kabupaten Bone, dengan menggunakan metode kualitatif yang berkesimpulan bahwa akuntabilitas, transparansi dan pengawasan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja anggaran.

UPTD Puskesmas Tinongko merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan, yang lebih mengutamakan promotive dan preventif, dalam anggaran pemerintahan UPTD ini mendapatkan anggaran dana BOK yang kemudian wajib melaksanakan semua program yang dianggarkan dan menyusun laporan realisasi penggunaan anggaran kepada pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan), sehingga perlunya akuntabilitas dan efektifitas dalam penggunaan anggaran dana BOK. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan , akuntabilitas dan efektifitas menjadi pokok dikarenanya untuk kesinambungan bantuan itu sendiri. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan anggaran BOK di UPTD Puskesmas Tinongko dan bagaimana efektifitas pengelolaannya.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian terapan (Applied Research) yang bertujuan menerapkan m, menguji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah praktis. Sugiyono (2013:4). Adapun tempat penelitian dilakukan pada UPTD Puskesmas Tinongko Kecamatan Wori KABUPATEN Minahasa Utara, waktu penelitian dimulai dari pertengahan bulan juli 2021 sampai awal bulan agustus 2021. Variable yang digunakan yaitu analisis akuntabilitas berupa laporan keuangan UPTD Puskesmas Tinongko yang akan dibandingkan dengan aturan Laporan keuangan Sektor Publik sehingga akan ditemukan apakah Laporan keuangan dari instansi ini akuntabilitas atau tidak. Analisis efektivitas menggunakan Value For Money yaitu :

- a. Tingkat Ekonomis :

$$Ekonomis = \frac{Input}{Input\ Value} \times 100\%$$

- b. Tingkat Efisiensi :

$$Efisiensi = \frac{Output}{Input} \times 100\%$$

- c. Tingkat Efektivitas :

$$Efektifitas = \frac{Outcome}{Output} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Puskesmas tinongko mempunyai wilayah kerja disebagian daerah kecamatan wori yang mencakup pulau mantehage dan pulau nain dengan jumlah tujuh desa, Secara geografis, pada Pulau Mantehage

terdapat empat desa, yaitu Desa Mantehage Buhias, Desa Mantehage I Tangkasi, Desa Mantehage II Bango, Desa Mantehage III Tinongko, diakses menggunakan kendaraan bermotor maupun transportasi laut dan pulau nain terdiri dari tiga desa, yaitu Desa Nain, Desa Nain I dan Desa Tatampi (Dua wilayah terpisah yaitu Tampi dan Tarente) dengan akses menggunakan transportasi laut ataupun berjalan kaki. Secara geografis puskesmas ini mempunyai letak yang sulit untuk di jangkau masyarakat berada di pulau nain dikarenakan jauh.

Berdasarkan deskriptif penelitian yang menggunakan metode wawancara bahwa bantuan operasional kesehatan berdasarkan petunjuk teknis (JUKNIS) penggunaan dana alokasi khusus (DAK) non fisik yang setiap tahun selalu diperbaharui, alokasi dana BOK merupakan program yang disalurkan dari puskesmas berdasarkan kinerja dari setiap program pada tahun sebelumnya. Tidak ada syarat khusus untuk puskesmas agar bias mendapatkan BOK ini, karena BOK ini memang untuk seluruh puskesmas yang ada, tetapi yang membedakan adalah nominal dari tiap-tiap puskesmas dikarenakan banyaknya nilai dilihat dari aspek jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi geografis, tingkat kesulitan wilayah dan jumlah tenaga.

REALISASI ANGGARAN BOK PUSKESMAS TINONGKO TAHUN 2020

PUSKESMAS	ALOKASI	REALISASI (%)
UPTD PUSKESMAS TINONGKO	Rp 389.777.000	100%
JUMLAH	Rp 389.777.000	100%

Untuk efektivitas penggunaan anggaran BOK dilakukan perhitungan yaitu

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Dengan kriteria

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (<100%) maka dikatakan **tidak efektif**

- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (=100%) maka dikatakan **efektif berimbang**
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (>100%) maka dikatakan **efektif**

Dan hasil perhitungannya

$$\frac{389.777.000}{389.777.000} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran diatas, maka dapat dikatakan bahwa pemanfaatan anggaran BOK di Puskesmas berjalan dengan efektif. Walaupun pada pelaksanaannya ada begitu banyak hambatan yang dirasakan, akan tetapi pemanfaatan anggaran BOK ini tetap diupayakan untuk efektif.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa puskesmas Tinongko telah melakukan pelaporan penggunaan anggaran sesuai dengan standar yang berlaku mengacu pada JUKNIS penggunaan anggaran BOK yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Selain itu penyusunan RKA juga melalui proses rapat yang melibatkan penganggung jawab masing-masing program. Tingkat efektivitas dalam penggunaan anggaran juga berada pada pencapaian 100%, walaupun terdapat hambatan, akan tetapi manajemen puskesmas berusaha sebaik mungkin bias efektif dan bermanfaat bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tinongko. Saran penulis agar lebih meningkatkan sosialisasi tentang program BOK ke masyarakat banyak, agar masyarakat lebih memahami fungsi dari BOK itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, N., 2007. Good e-Governance: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government. Bayumedia Publishing. Malang.
- Kepmenkes RI No. 128/Menkes/SK/II/2004. 2004. *Kebijakan Dasar Puskesmas*. Jakarta
- Mardiasmo, 2006. *Akuntansi Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Republik Indonesia. 2007. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan Di Puskesmas
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Suharsaputra, Uhar, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.